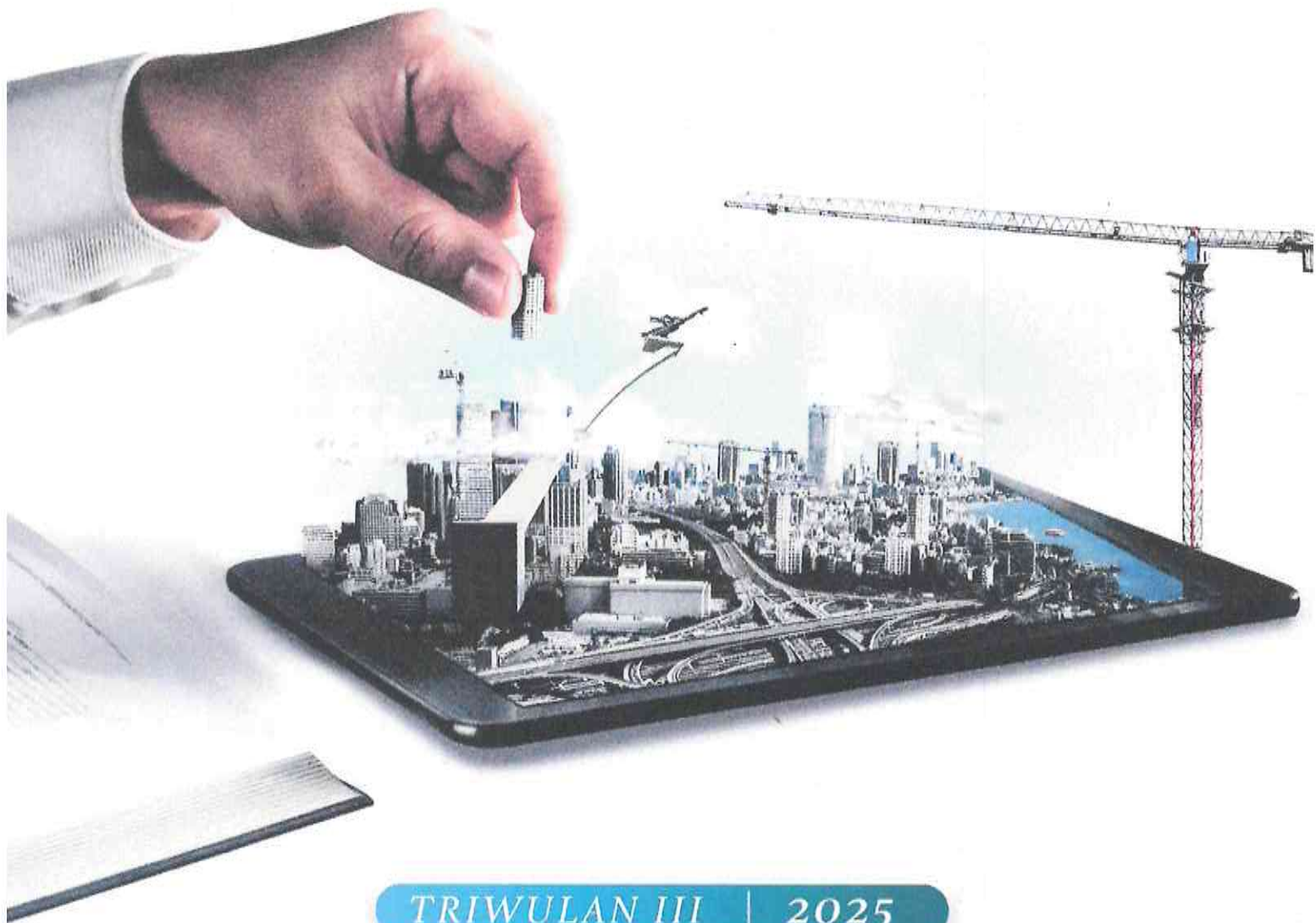




LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



TRIWULAN III | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Kalimantan Utara Tahun 2025**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monotoring Capaian Kinerja Triwulan II
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Kalimantan Utara
Tahun 2025**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	1. M. Rifa Badiurrohman, S.Tr.Tra	Pengawas Transportasi Darat	15/10 2025	
		2. Valka Ramdani Himawan, S.Tr.T	Penelaah Teknis Kebijakan	15/10 2025	
		3. Abdul Haris Syariful Quro`, S.Tr.Tra.	Penelaah Teknis Kebijakan	15-10-2025	
2.	Diperiksa	Iwan Sarwoko, S.SiT., M.T.	Kepala Balai	15/10 2025	

KATA PENGANTAR

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat. Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Triwulan III tahun 2025 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan III tahun 2025.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah pada tahun-tahun mendatang.

Tanjung Selor, 15 Oktober 2025
Kepala BPTD Kelas III Kalimantan Utara



IWAN SARWOKO, S.SiT., M.T
NIP. 197604101998031006



• KATA

PENGANTAR



RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming melanjutkan Kepemimpinannya melalui Kabinet Merah Putih periode Tahun 2025 - 2029 mengusung Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”.

Visi tersebut akan diwujudkan dalam 8 Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam RPJMN periode 2025-2029. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung terwujudnya

visi Presiden Republik Indonesia 2025-2029, yaitu: Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya organisasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2025, ditetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Triwulan IV tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara sudah cukup baik. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase layanan angkutan jalan perintis terealisasi sebesar 56,71% (Target 90%);
2. Persentase Jumlah Simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda sebesar 61,98% (Target 1 Lokasi);
3. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 34,37% (Target 90%);
4. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 65,44% (Target 11 lokasi);
5. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 569,98% (Target 90%);
6. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0% (Target 100 orang);
7. Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar 0% (Target 80%);

8. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 4,04% (Target 100);
9. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 52,99% (Target 100).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	14
I.1 Latar Belakang	14
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	14
I.2.1 Bagan Struktur Organisasi	15
I.3 Sumber Daya Manusia	16
I.4 Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan	16
I.5 Sistematika Laporan	18
I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	20
I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	22
I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	28
II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	28
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	28
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	32
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	48
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	58
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel 61	
II.3 Realisasi Anggaran	65
II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025	65
II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025	70
BAB III PENUTUP	76
III.1 PENUTUP	76
III.2 HASIL EVALUASI, REKOMENDASI DAN UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	77
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029 (Tabel Realisasi 2020-2022 merupakan data BPTD Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan Target 2023 merupakan target untuk BPTD Kelas III Kalimantan Utara).....	20
Tabel I. 2 Rencana Kerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025.....	22
Tabel I. 3 Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2024.....	24
Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Balai Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025	31
Tabel II. 2 Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	34
Tabel II. 3 Progres Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Triwulan II Tahun 2025	36
Tabel II. 5 Lintasan Angkutan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	41
Tabel II. 6 Progres Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2025	42
Tabel II. 7 Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kalimantan Utara	45
Tabel II. 8 Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	63
Tabel II. 9 Rincian per Sumber Dana Pagu Tahun 2025.....	66
Tabel II. 10 Rincian per Jenis Belanja Pagu Tahun 2025.....	66
Tabel II. 11 Rincian Revisi per Sumber Dana Tahun 2025	66
Tabel II. 12 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025.....	67
Tabel II. 13 Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025	68
Tabel II. 14 Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025	69
Tabel II. 15 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2023-2025.....	69
Tabel II. 16 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA.....	71
Tabel II. 17 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025.....	71
Tabel II. 18 Realisasi Anggaran per Jenis Sumber Dana Triwulan II TA 2025	72
Tabel II. 19 sisa Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025 Berjalan	73
Tabel II. 20 sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025 Berjalan	73
Tabel II. 21 Efisiensi Anggaran	73
Tabel II. 22 Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Jumlah eksisting SDM.....	74
Tabel III. 1 Evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Bagan struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara.....	15
Gambar II. 1 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025.....	33
Gambar II. 2 Grafik Capaian IKK Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda.....	38
Gambar II. 3 Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.....	41
Gambar II. 4 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.....	45
Gambar II. 5 Grafik Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal	49
Gambar II. 6 Grafik Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.	52
Gambar II. 7 Grafik Presentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor.....	55
Gambar II. 8 Grafik Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.	59
Gambar II. 9 Grafik Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.	62
Gambar II. 10 Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2023-2025.....	70
Gambar II. 11 Grafik Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan III Tahun 2025	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	80
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	81
Lampiran 3 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025	91
Lampiran 4 Rencana Aksi Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 5 Monev Renaksi	92



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat dituntut menjadi unit pelaksana yang melakukan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta menyelenggarakan manajemen perencanaan, program, anggaran, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan di satuan pelayanan masing – masing hingga evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Sebagai salah satu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip – prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara merupakan salah satu UPT dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mendukung tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap Pelabuhan Penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan penyeberangan. Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balai Pengelola

Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;

2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan jalan antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, Sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan Masyarakat;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

1.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Bagan struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara

I.3 Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara memiliki Sumber Daya Manusia dengan jumlah total Pegawai 88 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 66 orang dan Pegawai Non ASN sebanyak 23 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor induk Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara sebanyak 48 orang ASN dan 13 orang Pegawai Non ASN.
2. Wilayah Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara:
 - a. Wilayah Kerja Tanjung Selor 2 orang ASN dan 2 orang Pegawai Non ASN
 - b. Wilayah Kerja Tarakan 7 orang ASN
 - c. Wilayah Kerja Kabupaten Tana Tidung 1 orang ASN dan 2 orang Pegawai Non ASN
 - d. Wilayah Kerja Pulau Bunyu 3 orang ASN
 - e. Wilayah Kerja Nunukan 2 orang ASN dan 4 orang Pegawai Non ASN
 - f. Wilayah Kerja Sebatik 2 orang Pegawai Non ASN
 - g. Wilayah Kerja Malinau 3 orang ASN

I.4 Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan

1. Kewenangan

- a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- b. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.
- c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan

Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);

- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

d. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

2. Anggaran

Pada tahun 2025, terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

3. Isu strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara adalah:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Perintis Penyeberangan;
2. Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Perintis Jalan;
3. Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Perintis Barang;
4. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Wilayah Kalimantan Utara;
5. Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan;
6. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
7. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
8. Pembinaan terhadap ODOL (Over Dimension Over Loading);
9. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) ini disusun dengan istematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - II.2.1 SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi**
 - IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional
 - IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda
 - IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

II.2.2 SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat

IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

II.2.3 SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

IKK 4.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

II.2.4 SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

II.3.3 Analisis Atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;
5. Lain – lain yang dianggap perlu.

I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2025 - 2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2025 - 2029 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperhatikan konsep Balanced Score Card (BSC) dan prinsip manajemen kinerja dan sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 - 2025, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029

Tabel I. 1 Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029 (Tabel Realisasi 2020-2022 merupakan data BPTD Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan Target 2023 merupakan target untuk BPTD Kelas III Kalimantan Utara)

N O	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUA N	TARGE T 2023	TARGE T 2024	TARGE T 2025
1	SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	%	90	90	90
			IKK1.3	Persentase Layanan Angkutan Barang Prioritas Nasional (Subsidi	%	90	90	90

				Angkutan Barang)				
			IKK1. 5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	90	90
			IKK1. 6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	%	90	90	90
					Lokasi	1	7	11
2	SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3. 1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	90	90
					%	90	90	90
			IKK3. 5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	100	100
			IKK7 a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	80	80
					%	80	80	80
3	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4. 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	100	100

4	SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	100	100
					Nilai	100	100	100

I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 terdiri dari Indikator Kinerja Utama guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai. RKT Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel I. 2 Rencana Kerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK 1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	%	90

	keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11
3	SK Meningkatnya	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
	4 Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80

4	SK Meningkatkan 4 penunjang teknis transportasi darat	IKK4.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
5	SK Meningkatkan 5 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	IKK5.1 Tingkat Penyelenggaraa n Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

1.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran awal Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara sebesar Rp. 81.065.404.000,- . Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK Meningkatkan 1 konektivitas transportasi darat dan	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	%	90

	keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11
3	SK Meningkatnya	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
	4 Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80

4	SK 4	Meningkatnya penunjang teknis transportasi darat	IKK4.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
5	SK 5	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	IKK5.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Kegiatan

Anggaran

- | | | | |
|----|--|-----|----------------|
| 1. | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat | Rp. | 34.789.195.000 |
| 2. | Pelayanan Transportasi Darat | Rp. | 1.985.760.000 |
| 3. | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat | Rp. | 27.335.420.000 |
| 4. | Penunjang Teknis Transportasi Darat | Rp. | 4.101.000.000 |
| 5. | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. | 6.208.439.000 |
| 6. | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat | Rp. | 6.645.590.000 |



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Setiap penyelenggara SAKIP melakukan Pengukuran Kinerja yang diharapkan mampu menggambarkan posisi kinerja dari tingkat satuan kerja hingga tingkat kementerian. Cakupan Pengukuran Kinerja meliputi :

- a. Sasaran Kegiatan;
- b. Indikator Kinerja Kegiatan;
- c. Target;
- d. Realisasi;
- e. Pagu anggaran;
- f. Realisasi anggaran.

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e- Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu

materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Presentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran

capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 Dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara 2025-2029, bermuara pada terwujudnya 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2025- 2029.

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Balai Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3		
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi				T	R	C	T	R	C	T	R	C
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperitisan angkutan jalan nasional	%		90	90	3,68	4,08%	90	26,08	28,97%	90	56,71	61,01%
IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi		1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperitisan angkutan penyeberangan	%		90	90	0	0%	90	16,33	18,14%	90	34,37	38,18%
IKK 1.6	Jumlah pebbuhan SDP yang beroperasi	Lokasi		11	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%
SK4	Meningkatnya Keselamatan transportasi darat												
IKK 3.1	Persentase Perengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%		90	90	32,38	35,97%	90	57,76	64,17%	90	69,98	77,75
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang		100	100	0	0%	100	0	0%	100	0%	0%
IKK 7a	Persentase standarsasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%		80	80	0	0%	80	0	0%	80	0%	0%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat												
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai		100	100	2,08	2,08%	100	6,13	6,13%	100	4,04	4,04%
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel												
IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai		100	100	26,36	26,36%	100	46,25	46,25%	100	52,99	52,99
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan							20,34%			33,88%			39,43%

Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

48,21%

Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK100%)													
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurangdari 100% (0%IKK100%)													

Selama tahun 2025, ada 4 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 9 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025-2026.

Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat padakesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara.

Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Yaitu:

1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
2. IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda
3. IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
4. IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

a. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional

a. 1 Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.

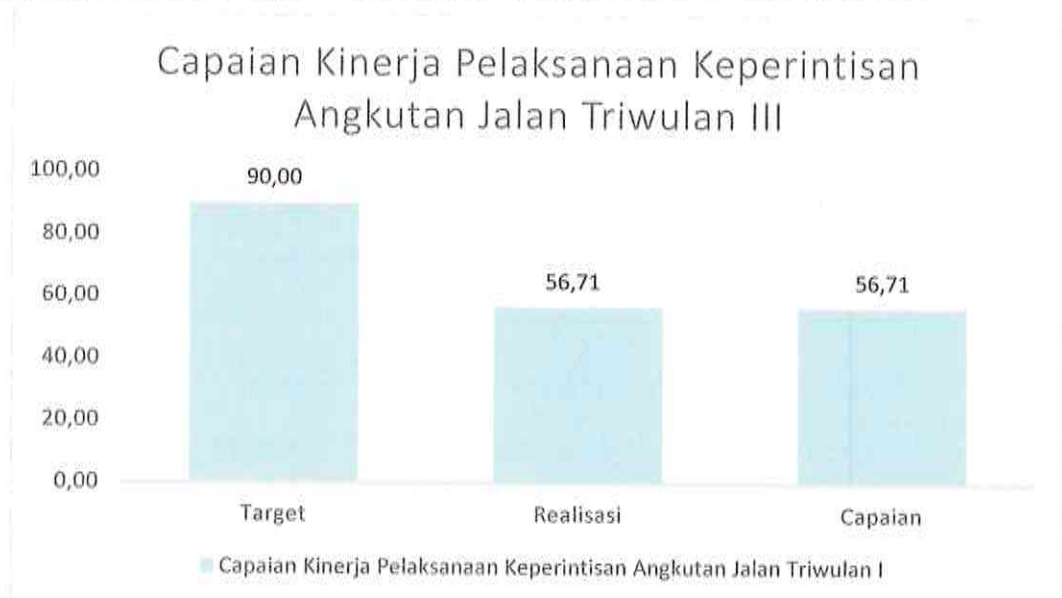
Capaian kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pelaksanaan keperintisan Angkutan Jalan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a. 2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja terhadap revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Triwulan III tahun 2025 sebesar 56,71%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.1 Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional tahun 2025. Berdasarkan laporan progres pelaksanaan penyelenggaraan layanan angkutan jalan perintis mulai menunjukkan kenaikan untuk realisasi setiap trayek yang dilayani hingga bulan maret dengan capaian nilai 56,71%.



Gambar II. 1 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5647/AJ.501/DRJD/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021, lalu di revisi dalam Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.550/AJ/501/DRJD/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5647/AJ.501/DRJD/2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021, target trayek pelayanan Angkutan Jalan Perintis adalah sebesar 325 trayek.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 90% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang Triwulan III tahun 2025 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2025.

Dari jumlah trayek dalam Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.550/AJ/501/DRJD/2021 sebanyak 325 diantaranya terdapat 5 (lima) trayek di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel II. 2 Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

No	Provinsi	Trayek yang Dilayani
1	2	3
1	Kalimantan Utara	Tanjung Selor – Tideng Pale
2		Malinau – Salang
3		Tanjung Selor – Long Tunggu
4		Tanjung Selor – Mangkupadi
5		KTT - Malinau

Terdapat 5 trayek yang beroperasi di tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau

penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Akan tetapi pada bulan Maret sudah beroperasi normal.

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional antara lain:

- 1) Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan;
- 2) Perencanaan yang matang dalam menentukan trayek yang akan dilayani oleh angkutan perintis tersebut;
- 3) Minat masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan angkutan perintis tersebut;
- 4) Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilih transportasi yang dengan biaya yang terjangkau.

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional antara lain:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya angkutan keperintisan
3. Kendala dalam mendapatkan BBM Bersubsidi karena kelangkaan di beberapa wilayah yang dilayani angkutan perintis sehingga harus menggunakan BBM Non-Subsidi
4. Kendala dalam melaksanakan operasional keperintisan di wilayah seular dikarenakan adanya penolakan oleh beberapa masyarakat yang memiliki profesi sebagai pengemudi travel
5. Makin maraknya mobil travel ilegal dengan kemudahan aksesnya.
6. Sebagian besar akses jalan menuju daerah yang dijangkau oleh angkutan perintis ini masih rusak dan sulit ditempuh.
7. Faktor cuaca maupun kondisi geografis dari daerah yang dijangkau angkutan perintis

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Rata-rata Persentase Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Kalimantan Utara sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 56,71% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II. 3 Progres Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Triwulan III Tahun 2025

No	Trayek	Jumlah Trip /Tahun	Realisasi (Trip)			Total Realisasi (Trip)	Persentase (%)
			Jul	Agu	Sep		
1	Tanjung Selor – Tideng Pale	636	60	62	60	182	28,61%
2	Malinau – Salang	634	62	62	60	184	29,02%
3	Tanjung Selor – Long Tunggu	1156	116	128	125	369	31,9%
4	Tanjung Selor – Magkupadi	1172	124	126	122	372	31,74%
5	KTT - Malinau	1172	120	126	124	380	32,42%
Jumlah		4770	482	504	491	1.487	31,17%

Realisasi Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\%Realisasi = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$\%Realisasi = \frac{1487}{4770} \times 100\% = 31,17\%$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu tercapainya target perjalanan pulang pergi (rit) dan kebermanfaatan dalam satu tahun pelayanan. Capaian rit untuk masing-masing trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

$$\%Capaian = \frac{\%Realisasi}{\%Target} \times 100\%$$

$$\%Realisasi = \frac{31,17\%}{90\%} \times 100\% = 34,63\%$$

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Triwulan III Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 4.518.507.000 dengan realisasi di Tahun 2025 Rp. 2.562.504.197 atau mencapai 56,71%.

a. 4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Kalimantan Utara dengan memperhatikan RPJMN, Renstra, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan.
2. Komitmen antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum.
3. Dapat terus Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dalam pelayanan jasa angkutan umum.
4. Meningkatkan kualitas layanan dari moda angkutan darat.
5. Dapat terus Mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang handal.
6. Selalu Menciptakan rasa nyaman dan efisiensi terhadap pengguna jasa angkutan umum.
7. Dapat Mewujudkan konektivitas transportasi darat.

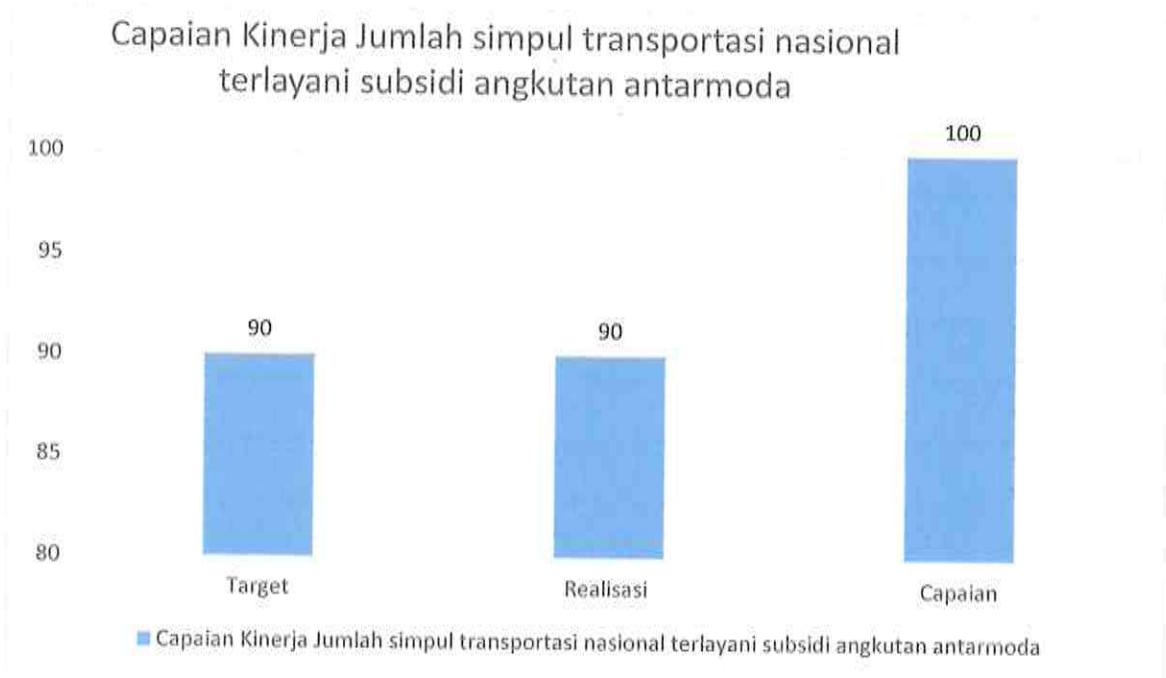
b. IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

a.1. Definisi Indikator Kerja

Jaringan Lintas Angkutan Barang Perintis dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di jalan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan sesuai dengan KP-DRJD 8824 Tahun 2023. BPTD Kalimantan Utara melayani subsidi Angkutan Barang Tol Laut Provinsi Kalimantan Utara dari pelabuhan Nunukan – Ibu Kota Kabupaten Nunukan dengan Jarak Tempuh Tujuh Kilo Meter.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja terhadap revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda Triwulan III tahun 2025 sebesar 1 jika dibanding target PK tahun 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada gambar II.2 Grafik Capaian IKK jumlah layanan angkutan barang yang beroperasi.



Gambar II. 2 Grafik Capaian IKK Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 8824 Tahun 2023 Tentang Jaringan lintas angkutan barang perintis dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan untuk barang di jalan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Dimulai dari Pelabuhan Nunukan – Ibu Kota Kabupaten Nunukan Dengan Jarak Tujuh Kilo Meter.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda terhadap konektivitas

transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 1 Lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap revisi PK dan berdasarkan arahan pimpinan.

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan barang.
2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang terluar dan tetinggal.
3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu bantuan subsidi yang sangat membantu di daerah tersebut.

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda antara lain:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan;
2. Ketidaktahuan masyarakat terhadap pelayanan keperintisan angkutan barang.

- Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja kegiatan angkutan barang yang beroperasi tahun 2025 terhadap target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\%Realisasi = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$\%Realisasi = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

- Capaian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja kegiatan angkutan barang yang beroperasi tahun 2025 terhadap target perjanjian kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = 1 \times 100\% = 100\%$$

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 6.798.180.000 Dengan realisasi di Triwulan III tahun 2025 sebesar Rp. 4.213.638.692 Atau mencapai 61,98%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan keamanan bagi pengguna perintis angkutan barang
2. Meningkatkan kemampuan pelayanan guna mengantisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang
3. Meningkatkan minat masyarakat agar lebih banyak menggunakan perintis angkutan barang

c. IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

a.1. Definisi Indikator Kerja

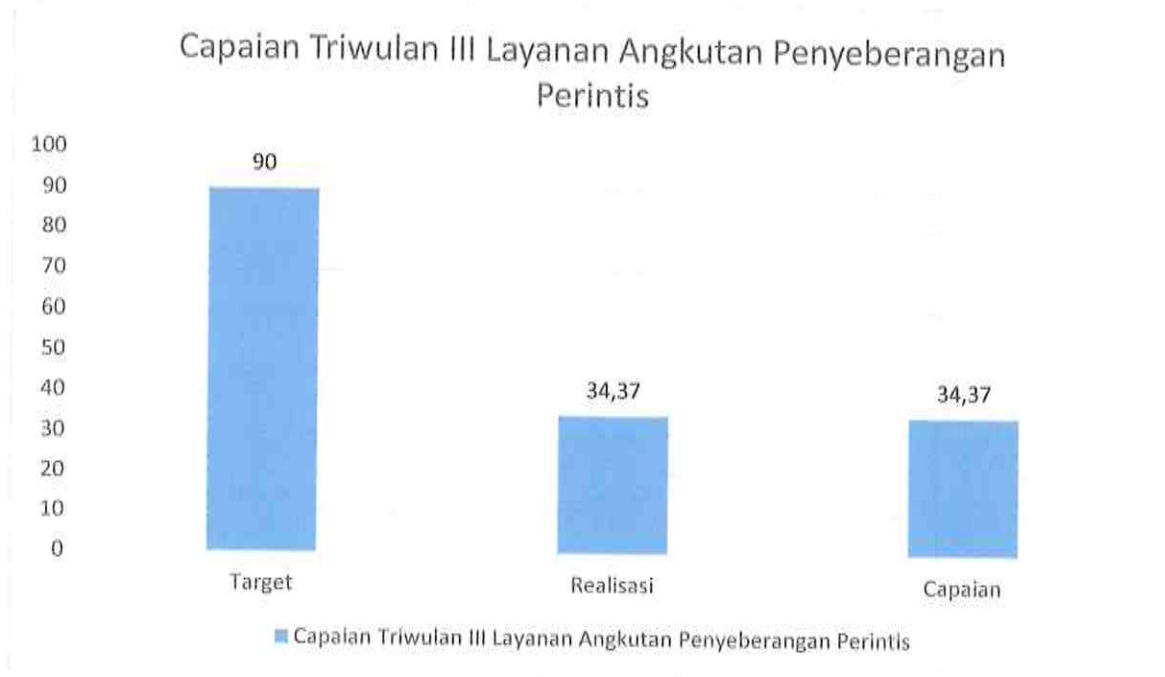
Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan merupakan kegiatan BPTD Kelas III Kalimantan Utara yang saat ini bertugas untuk melakukan pengawasan operasional harian dan berkala terhadap kapal SDP agar penyelenggaraannya berjalan sesuai aturan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Persentase capaian kinerja pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah trip Penyeberangan yang terealisasi Dengan target yang telah ditetapkan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\%Realisasi = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Triwulan III tahun 2025 sebesar 70 trip jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 34,37%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.3 Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.



Gambar II. 3 Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4550/AP.204/DRJD/2019 Tanggal 04 November 2019 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun 2020, terdapat 253 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga) lintas penyeberangan perintis di seluruh Indonesia.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Dari jumlah trayek dalam Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.550/AJ/501/DRJD/2021 sebanyak 325 diantaranya terdapat 3 Lintasan yang melayani angkutan penyeberangan perintis di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel II. 4 Lintasan Angkutan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

No	Provinsi	Lintasan yang di layani
1	2	3
1	Kalimantan Utara	Tarakan - Nunukan
2		Nunukan - Simenggaris
3		Tarakan - Tolitoli

Rata-rata persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Kalimantan Utara sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 34,37% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II. 5 Progres Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2025

NO	Lintasan	Nama Kapal	Jumlah Trip /Tahun	Realisasi (Trip)			Total Realisasi (Trip)	Persentase (%)
				Jul	Agu	Sep		
1	Tarakan - Nunukan	KMP. Manta II	156	26	25	-	51	32,69%
2	Nunukan - Simenggaris	KMP. Manta II	48	8	8	-	16	33,3%
3	Tarakan - Tolitoli	KMP. Julung-julung	48	4	2	-	6	12,5%
Jumlah			252	38	35	-	73	28,96%

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Harga tiket yang kompetitif sehingga meringankan masyarakat
2. Jalur yang dilayani untuk masyarakat yang terisolir
3. Kepastian jam operasioanal Keperintisan Angkutan Penyeberangan
4. Satu-satunya pilihan moda transportasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan.

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Faktor cuaca seperti tingginya ombak laut
2. Jadwal Oprasional tidak Terlalu banyak
3. Masyarakat masih belum mengetahui tentang Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan.

- Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan keperintisan angkutan penyebrangan yang beroperasi Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\%Realisasi = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$\%Realisasi = \frac{86}{252} \times 100\% = 34,12\%$$

- Capaian Kinerja

Capaian kinerja persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrngan tahun 2025 sebesar 34,37%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari realisasi dibagi target dikali 100 persen. Artinya nilai capaian berhasil memenuhi target. Trayek Kegiatan perintis angkutan barang 2025 masih sama dengan tahun 2024, pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis angkutan barang berhenti dan pada bulan maret sudah beroperasi seperti biasa.

- Realisasi anggaran

Adapun anggaran terkait perintis angkutan penyebrangan yang beroperasi Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 15.690.023.000,- dengan realisasi di Tahun 2025 Rp. 5.392.041.563,- atau mencapai 34,37%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memenuhi persyaratan teknis laik laut dan SPM kapal penyeberangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menghubungkan daerah yang belum memiliki moda transportasi lain secara memadai;
3. Menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani pelayaran niaga;
4. Melaksanakan standar pelayanan sesuai SOP yang telah dibuat.

d. IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kerja

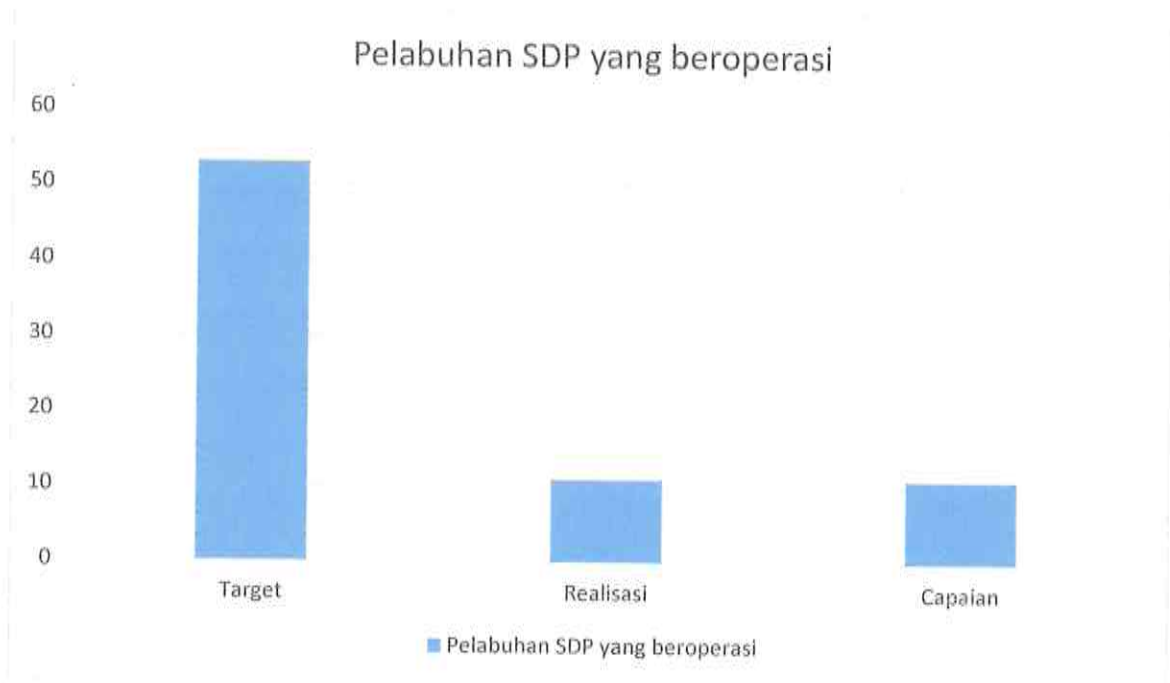
BPTD Kelas III Kalimantan Utara memiliki Pelabuhan Penyeberangan SDP beserta seluruh staf yang berfungsi melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh Pelabuhan Penyeberangan terhadap keselamatan transportasi angkutan umum di darat berjalan dengan benar serta mengevaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM. Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja 2025

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Triwulan III tahun 2025 sebesar 53 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 11 lokasi maka capaian kinerja mencapai 65,44%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.4 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.



Gambar II. 4 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas III Provinsi Kalimantan Utara terdapat 6 Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP, namun sampai dengan tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas III Provinsi Kalimantan Utara mengawasi 6 Wilayah Kerja dengan 11 Pelabuhan yang beroperasi. Adapun Pelabuhan tersebut anatara lain, sebagai berikut:

Tabel II. 6 Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kalimantan Utara

No	Provinsi	Pelabuhan yang Beroperasi
1	2	3
1	Kalimantan Utara	Pelabuhan Sungai Tengkeyu, Tarakan
2		Pelabuhan Penyeberangan Juata, Tarakan
3		Pelabuhan Sungai Liem Hie Djung, Nunukan
4		Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun, Nunukan
5		Pelabuhan Penyeberangan Sei Manggaris, Nunukan
6		Pelabuhan Sungai Sei Nyamuk, Nunukan
7		Pelabuhan Penyeberangan Liang Bunyu, Sebatik

8		Pelabuhan Penyeberangan Sebawang, kabupaten Tana Tidung
9		Pelabuhan Sungai Tideng Pale, kabupaten Tana Tidung
10		Pelabuhan Penyeberangan Pulau Bunyu
11		Pelabuhan Sungai Kayan, Tanjung Selor

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas III Provinsi Kalimantan Utara terdapat 6 Pelabuhan Sungai, Danau dan penyeberangan, yaitu:

1. Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun
2. Pelabuhan Penyeberangan Juata
3. Pelabuhan Sungai Malinau Kota
4. Pelabuhan Sungai Djang Kida
5. Pelabuhan Sungai Sei Ular

Namun pada kenyataannya terdapat 11 Pelabuhan yang beroperasi di BPTD Kelas III Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

1. Pelabuhan Sungai Tengkeyu, Tarakan
2. Pelabuhan Penyeberangan Juata, Tarakan
3. Pelabuhan Sungai Liem Hie Djung, Nunukan
4. Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun, Nunukan
5. Pelabuhan Penyeberangan Sei Manggaris, Nunukan
6. Pelabuhan Sungai Sei Nyamuk, Nunukan
7. Pelabuhan Penyeberangan Liang Bunyu, Sebatik
8. Pelabuhan Penyeberangan Sebawang, kabupaten Tana Tidung
9. Pelabuhan Sungai Tideng Pale, kabupaten Tana Tidung
10. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Bunyu
11. Pelabuhan Sungai Kayan, Tanjung Selor

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Petugas yang kompeten dibidangnya

2. Kordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait
 3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja
 4. Operasional pelabuhan yang baik.
 5. Perencanaan yang matang dalam pembangunan Pelabuhan SDP.
 6. Anggaran yang terserap dengan baik.
- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

 1. Kurangnnya SDM yang ada
 2. Keadaan Alam Sering menjadi masalah yang sering terjadi di sekitar kantor
 3. masih perlu peningkatan fasilitas kantor
 4. Tempat sulit Dijangkau
 - Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\%Realisasi = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$\%Realisasi = \frac{11}{53} \times 100\% = 20,75\%$$

- Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2025 sebesar %. Dimana hasil persentase capaian berasal dari realisasi dibagi target 100 persen. Artinya nilai capaian berhasil memenuhi target.

$$\%Capaian = \frac{11}{53} \times 100\% = 20,75\%$$

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Operasional Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 1.257.608.000 dengan realisasi di Tahun 2025 Rp. 823.578.509 atau mencapai 65,44%.

a.4.Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Terpenuhiny persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di sungai danau dan penyeberangan;
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan SDP;
3. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikuti diklat;
4. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan.

Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 Diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Yaitu:

1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
2. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
3. IKK 7.a Persentase standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor

a. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas III Kalimantan Utara memiliki tugas dan fungsi untuk menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan, membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan, serta melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang sesuai kondisi ideal. Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda.

Adapun 10 (sepuluh) item dimaksud meliputi :

- 1) Alat Penerangan Jalan;
- 2) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas smart system;
- 3) Marka Jalan;
- 4) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;

- 5) Paku Jalan;
- 6) Rambu Lalu Lintas;
- 7) Rambu Tiang Gawang;
- 8) Rambu Tiang F;
- 9) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan;
- 10)Pagar Pengaman Jalan;

Capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan. Untuk menghitung Indikator Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Triwulan III tahun 2025 sebesar jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 69,98%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.5 Grafik Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal.



Gambar II. 5 Grafik Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal berdasarkan Perjiden SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 90% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2025.

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal antara lain:

1. Kondisi dilapangan yang mendukung, seperti cuaca
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu
3. Kesesuaian dengan kebutuhan

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan (Cuaca buruk)
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan
3. Perkiraan Tidak sesuai dengan kebutuhan

- Realisasi Kinerja

Realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal memiliki realisasi 69,98%. Untuk menghitung Indikator Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian} = \frac{69,98}{80} \times 100\% = 87,47\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 25.435.420.000,- dengan realisasi di Triwulan III Tahun 2025 Rp. 17.800.890.549,- atau mencapai 69.98%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan jalan yang berkeselamatan.

b. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas III Kalimantan Utara memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan himbauan Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada para masyarakat melalui kegiatan pekan nasional keselamatan jalan.

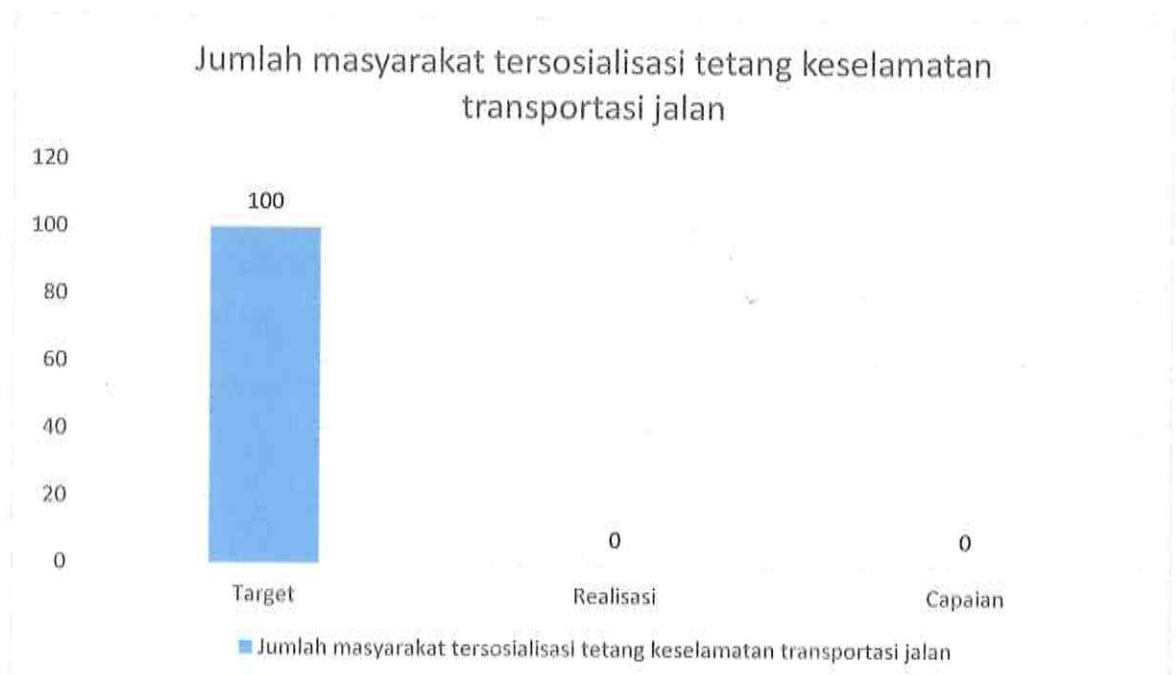
Capaian kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja 2024

Capaian kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 100 orang maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.6 Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.



Gambar II. 6 Grafik Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Sesuai dengan Pasal 208 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tentang Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b "Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Kecepatan terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 100 orang yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Sosialisasi tentang acara Pekan Keselamatan Jalan pada media sosial atau spanduk;
2. Tersedianya anggaran yang memadai;
3. Kerjasama Tim panitia pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan.

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Tidak tersampainya informasi keselamatan karena kurangnya informasi tentang sosialisasi;
2. Kurangnya minat Masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas;
3. Panitia penyelenggara kurang berpengalaman.

- Realisasi Kinerja

Persentase capaian Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun anggaran 2025 belum terealisasi karena sosialisasi pekan keselamatan jalan direncanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Mei.

- Capaian Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian} = \frac{0}{100} \times 100\% = 0\%$$

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 200.000.000,- dengan realisasi di Triwulan III Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Merencanakan kegiatan sosialisasi keselamatan transportasi jalan dengan matang;
2. Memberikan hiburan yang menarik dalam acara sosialisasi keselamatan transportasi jalan;
3. Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait demi terciptanya keberhasilan acara sosialisasi keselamatan transportasi jalan.

c. IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas III Kalimantan Utara memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan melakukan pengawasan uji berkala untuk memastikan alat uji disetiap PKB laik fungsi berjalan sesuai SOP pada seluruh kab/kota yang ada di Kalimantan Utara.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan bahwa Unit pelaksana Uji Berkala wajib melaksanakan pengujian setelah memperoleh akreditasi dan sertifikasi, menggunakan peralatan pengujian yang terkalibrasi dan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan hasil uji berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLU-E).

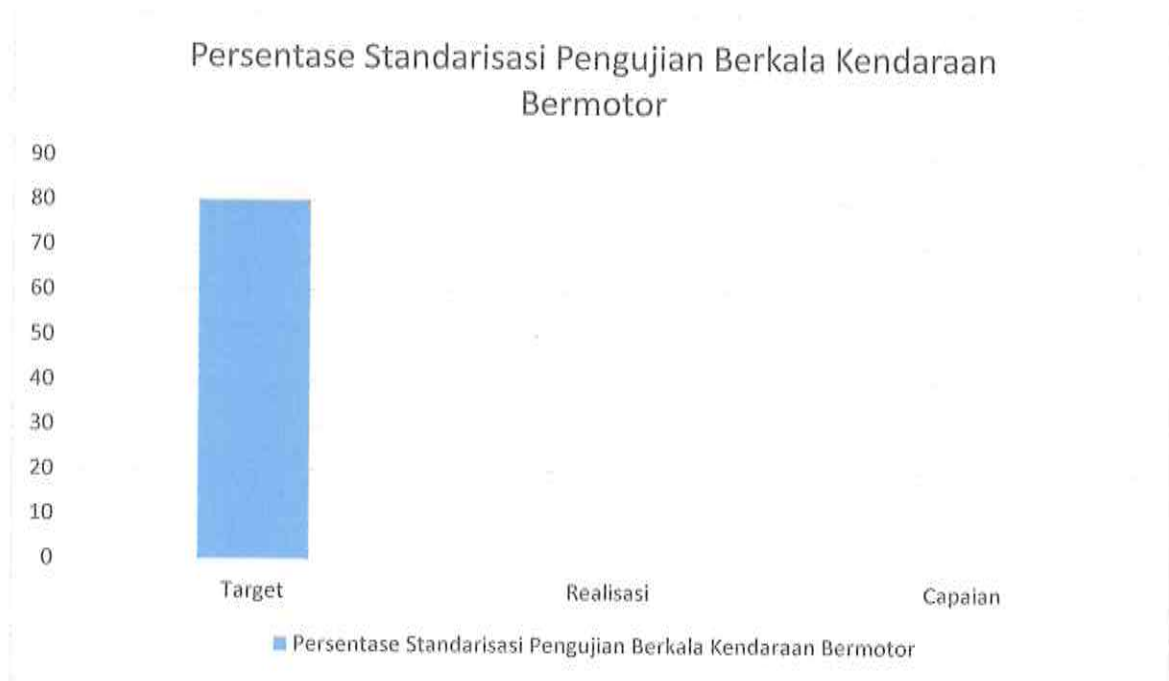
Standarisasi pengujian kendaraan bermotor dalam hal ini sebagai pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota dengan penetapan Akreditasi UPUBKB sebagai

bermotor adalah aspek pemenuhan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Capaian kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan

$$\text{Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja 2025

Capaian kinerja Presentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor Triwulan III Tahun 2025 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.7 Grafik Capaian IKK Presentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor.



Gambar II. 7 Grafik Presentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menjelaskan, Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan

menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Presentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 80% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Presentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor antara lain:

1. Permintaan dari Dishub Kab/ Kota yang ada di Kalimantan Utara;
2. Kelengkapan Alat uji yang akan di kalibrasi;
3. Pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai Standar Operasional Prosedur standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah ditetapkan;
4. Fasilitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang memadai.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Presentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor antara lain:

1. SDM yang kurang memadai dan tidak memiliki kompetensi terhadap pengujian kendaraan bermotor;
2. Kurangnya perawatan terhadap peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor
3. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang belum memenuhi syarat akreditasi
4. Ketidakmampuan Dishub Kab/Kota untuk memenuhi Fasilitas dan Alat uji kendaraan bermotor.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor memiliki realisasi 0%. Untuk menghitung Indikator

Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2025 merupakan kegiatan kalibrasi alat uji pada pengujian kendaraan bermotor di 2 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara yang mana pada Triwulan III ini belum melakukan kegiatan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian} = \frac{0}{80} \times 100\% = 0\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp.1.100.000.000,- dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terciptanya deteksi pencapaian kondisi laik pakai untuk menjamin ketelitian, ketepatan alat ukur/uji dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
2. Menjamin peralatan alat ukur/uji yang digunakan harus sesuai spesifikasi yang di persyaratkan;
3. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai standar dan SOP yang telah ditentukan;
4. Terus meningkatkan kualitas SDM terkait pengujian kendaraan bermotor melalui Bimtek dan pelatihan – pelatihan.

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu IKK 4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a. IKK 4.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat merupakan hasil kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan menggunakan uraian bobot menyesuaikan dengan target BPTD Kelas III Kalimantan Utara. Salah satu bobot yang mempengaruhi yaitu tingkat penyerapan Anggaran Satuan Kerja dengan menyesuaikan realisasi anggaran Tahun 2025 BPTD Kelas III Kalimantan Utara. Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM) dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin;
- c) Aspek Keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Berikut adalah tabel perhitungan nilai bobot pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat;
- d) Aspek Hukum dan Kerjasama.

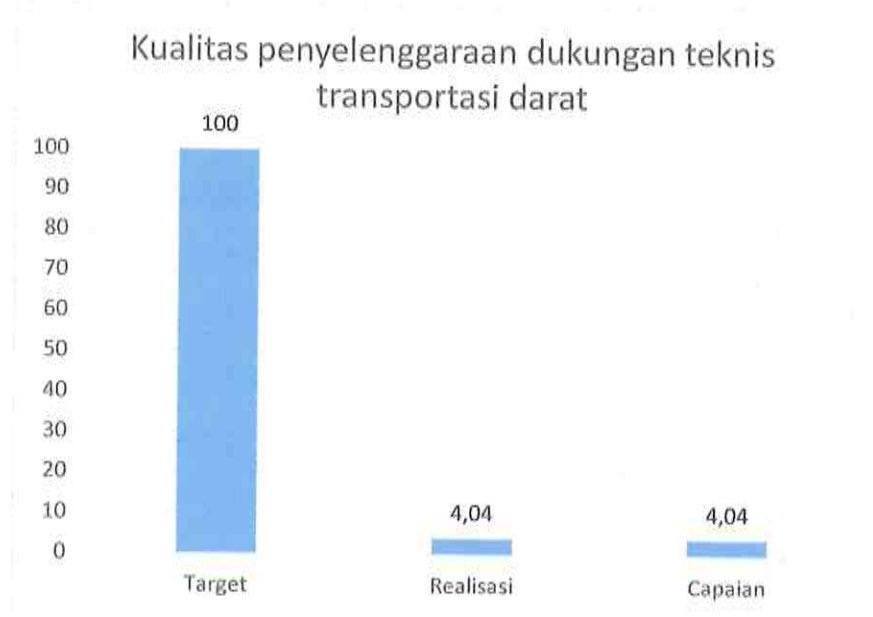
Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja tahun 2025

Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan III Tahun 2025 sebesar 4,04% jika dibandingkan dengan target PK 2025

sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 4,04%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.8 Grafik Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.



Gambar II. 8 Grafik Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terhadap Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat memiliki target senilai 100 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat pada tahun 2025 telah dilakukan untuk kegiatan penunjang teknis. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Penyusunan bahan RKA
2. Penyusunan SAKIP, LKIP dan Profil BPTD
3. Pengiriman Pegawai Diklat

4. Rapat Teknis, Koordinasi dan Konsolidasi
5. Monwas Hubdat
6. Kalibrasi alat uji;
7. Pengawasan Gakum;
8. Monev Angkutan Komersil dan Perintis
9. Pendataan dan Pengukuran Kapal Sungai dan Danau
10. Ramphcheck Kapal Penyeberangan
11. Monev Sarpras Ditjen Hubdat

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang sudah ditentukan
2. Terkoordinasikannya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dengan stakeholder terkait
3. SDM yang bersolidaritas
4. Kerjasama yang baik antar sesama pegawai dalam program penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat;
5. Penyerapan anggaran yang maksimal dan tepat guna;
6. Perencanaan yang matang terkait program penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Kerjasama yang kurang baik antar pegawai dalam mendukung program penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat;
2. Kurangnya keterlibatan pimpinan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program dukungan teknis transportasi darat.
3. Kurangnya SDM yang ada.

- Realisasi Kinerja

Realisasi kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian} = \frac{4,04}{100} \times 100\% = 4,04\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran kegiatan terkait Capaian Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025 yaitu senilai Rp 6.228.152.000,- dengan realisasi di Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp. 251.459.188 atau mencapai 4,04%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Melaksanakan pengelolaan naskah yang masuk dan keluar serta mengoreksi naskah dinas agar sesuai aturan;
3. Meningkatkan pengelolaan arsip baik inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan;
4. Dapat menyelesaikan capaian laporan bulanan, triwulanan dan tahunan berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan sebagai pertanggungjawaban tugas kepada atasan.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

a. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan III Tahun 2025 sebesar 52,99 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 52,99%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.9 Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar II. 9 Grafik Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara pada tahun 2025.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terhadap meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat memiliki target senilai 100 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara pada tahun 2025 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya Manajemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Lingkungan BPTD Kelas III Kalimantan Utara. Adapun beberapa pelayanan perkantoran yang telah diserap, yaitu:

1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2. Honorarium Satuan Kerja
3. Honorarium ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Adanya SDM yang berkompeten
2. Kegiatan yang ada di Kantor sudah terjadwal secara rutin
3. Evaluasi setiap bulan

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Adanya pengurangan anggaran
2. Kurangnya SDM yang ada.

- Realisasi Kinerja

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

Tabel II. 7 Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%	
	1	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III	15	
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

- A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;
- B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuissoner;
- C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran.

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan staf) di kantor}} \times 100\%$$

$$x = \frac{45}{47} \times 100\% = 95,74\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan staf) di kantor}} \times 100\%$$

$$y = \frac{32}{47} \times 100\% = 68,08 \%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan (unduh) di kantor}}{\text{Standar kecepatan internet (unduh) di kantor}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian} = \frac{52,99}{100} \times 100\% = 52,99\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran kegiatan terkait Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 15.179.131.000,- dengan realisasi di Triwulan III Tahun 2025 Rp. 8.043.555.471,- atau mencapai 52,99%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Pimpinan dapat melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
2. Dapat Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi dan misi sasaran yang telah ditetapkan;
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi yang mampu menjamin arah pembangunan secara berkesinambungan.

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

1. **Pagu Anggaran**

Pagu DIPA TA. 2025 pada triwulan ke III pagu sebesar Rp. 81.065.404.000, dengan rincian sebagai berikut:

a.1 Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025

Tabel II. 8 Rincian per Sumber Dana Pagu Tahun 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III	
		Rp	Rp	%
1	RUPIAH MURNI	78.623.021.000	40.262.388.000	51,21
2	PNBP	2.385.000.000	-	-
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		81.008.021.000	40.262.388.000	49,70

a.2 Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

Tabel II. 9 Rincian per Jenis Belanja Pagu Tahun 2025

	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III	
		Rp	Rp	%
1	BELANJA PEGAWAI	7.071.009.000	5.482.096.219	77,53
2	BELANJA BARANG	50.873.390.000	23.422.415.846	46,04
3	BELANJA MODAL	23.063.622.000	11.357.875.935	49,25
TOTAL		81.065.404.000	13.301.533.085	49,70

a.3 Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Surat Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kementerian Keuangan tanggal 2 Desember 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690669/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara TA. 2024 (DIPA awal).

2. Refocusing Anggaran Tahun 2025

a.1 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025

Tabel II. 10 Rincian Revisi per Sumber Dana Tahun 2025

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 1	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 2	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 3	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 4	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 5	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 6	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 7	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 8	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 9	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 10	78.780.404.000	2.285.000.000	0	81.065.404.000
REVISI KE - 11	78.780.404.000	2.285.000.000	0	81.065.404.000
REVISI KE - 12	78.361.363.000	2.285.000.000	0	80.646.363.000
REVISI KE - 13	78.361.363.000	2.285.000.000	0	80.646.363.000
REVISI KE - 14	78.623.021.000	2.385.000.000	0	81.008.021.000
REVISI KE - 15	78.623.021.000	2.385.000.000	0	81.008.021.000
REVISI KE - 16	78.623.021.000	2.385.000.000	0	81.008.021.000

a.2 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025

Tabel II. 11 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 1	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 2	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000

REVISI KE - 3	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 4	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 5	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 6	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 7	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 8	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 9	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 10	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 11	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 12	7.071.009.000	54.733.027.000	18.842.327.000	80.646.363.000
REVISI KE - 13	7.071.009.000	54.733.027.000	18.842.327.000	80.646.363.000
REVISI KE - 14	7.071.009.000	51.500.542.000	22.436.470.000	81.008.021.000
REVISI KE - 15	7.071.009.000	51.500.542.000	22.436.470.000	81.008.021.000
REVISI KE - 16	7.071.009.000	51.500.542.000	22.436.470.000	81.008.021.000

a.3 Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel II. 12 Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN III
BELANJA PEGAWAI	6.645.590.000	7.071.009.000	7.071.009.000
BELANJA BARANG	55.577.487.000	50.873.390.000	50.873.390.000
RM	54.392.487.000	49.588.39.000	49.588.39.000
PNBP	1.185.000.000	1.285.000.000	1.185.000.000
BELANJA MODAL	18.842.327.000	23.063.622.000	23.063.622.000
RM	17.742.327.000	21.963.622.000	21.963.622.000
PNBP	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
SBSN	-	-	-

TOTAL	81.065.404.000	81.008.021.000	81.008.021.000
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel II. 13 Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025

KODE	NOMENKLATUR	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III	
	PROGRAM			REALISASI	%
690669	Balai Pengelola Transportasi Darat Kalimantan Utara	81.065.404.000	81.008.021.000	40.262.388.000	49,70
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	68.211.375.000	65.828.890.000	31.710.085.963	48,17
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	34.789.195.000	30.506.710.000	12.275.778.995	40,24
4638	Pelayanan Transportasi Darat	1.985.760.000	1.258.608.000	823.578.509	65,44
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	27.335.420.000	28.435.420.000	18.359.269.271	64,56
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.101.000.000	5.628.152.000	251.459.188	4,47
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	12.854.029.000	15.179.131.000	8.552.302.037	56,34
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.208.439.000	8.108.122.000	3.070.205.818	37,87
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	6.645.590.000	7.071.009.000	5.482.096.219	77,53

3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2023-2025

Tabel II. 14 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2023-2025

NO	TAHUN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU AKHIR (Rp)	REALISASI TW III	
				Rp	%
1	2023	1.281.185.000	1.281.185.000	1.281.046.898	99,99%
2	2024	53.062.920.000	56.792.791.000	29.901.294.526	52,65%
3	2025	81.065.404.000	81.008.021.000	40.262.388.000	49,70%



Gambar II. 10 Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2023-2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing-masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2023 anggaran yang terserap sebesar Rp1.281.046.898,- atau mencapai 99,99% dari pagu akhir Rp. 1.281.185.000,-. Pada tahun 2024 berjalan tepatnya pada Triwulan III anggaran yang terserap sebesar Rp. 29.901.294.526,- atau mencapai 52,65% dari pagu akhir Rp. 56.792.791.000,-. Dan pada tahun 2025 berjalan tepatnya pada Triwulan III anggaran yang terserap sebesar Rp. 40.262.388.000,- atau mencapai 49,70% dari pagu awal Rp. 81.065.404.000,-.

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 15 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KODE	NOMENKLATUR	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III	
	PROGRAM			REALISASI	%
690669	Balai Pengelola Transportasi Darat Kalimantan Utara	81.065.404.000	81.008.021.000	40.262.388.000	49,70
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	68.211.375.000	65.828.890.000	31.710.085.963	48,17
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	34.789.195.000	30.506.710.000	12.275.778.995	40,24
4638	Pelayanan Transportasi Darat	1.985.760.000	1.258.608.000	823.578.509	65,44
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	27.335.420.000	28.435.420.000	18.359.269.271	64,56
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.101.000.000	5.628.152.000	251.459.188	4,47
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	12.854.029.000	15.179.131.000	8.552.302.037	56,34
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.208.439.000	8.108.122.000	3.070.205.818	37,87
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	6.645.590.000	7.071.009.000	5.482.096.219	77,53

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 40.262.388.000,- atau mencapai 49,70% dari pagu akhir Rp. 81.008.021.000,-.

2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

Tabel II. 16 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW III	
		Rp	Rp	%
1	BELANJA PEGAWAI	7.071.009.000	5.482.096.219	77,53
2	BELANJA BARANG	50.873.390.000	23.422.415.846	46,04
3	BELANJA MODAL	23.063.622.000	11.357.875.935	49,25
TOTAL		81.008.021.000	40.262.388.000	49,70

3. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per sumber dana pada tahun 2025 yang sudah di analisis per Triwulan III, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 17 Realisasi Anggaran per Jenis Sumber Dana Triwulan III TA 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III	
		Rp	Rp	%
1	RUPIAH MURNI	78.623.021.000	40.262.388.000	51,21
2	PNBP	2.385.000.000	-	-
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		81.008.021.000	40.262.388.000	49,70



Gambar II. 11 Grafik Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan III Tahun 2025

4. Analisis Dana yang tidak terserap oleh unit kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2025 berjalan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 18 sisa Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025 Berjalan

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	BELANJA PEGAWAI	6.645.590.000	3.505.433.213	3.140.156.787
2	BELANJA BARANG	55.577.487.000	17.219.575.886	38.357.911.114
3	BELANJA MODAL	18.842.327.000	8.140.104.056	10.702.222.944
TOTAL		81.065.404.000	28.865.113.155	52.200.290.845

Tabel II. 19 sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025 Berjalan

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	RUPIAH MURNI	78.780.404.000	28.865.113.155	49.915.290.845
2	PNBP	2.285.000.000	-	2.285.000.000
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		81.065.404.000	28.865.113.155	52.200.290.845

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan berdasarkan sasaran program per Triwulan III Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 20 Efisiensi Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN		TRIWULAN III		
			%CAPAIAN RATA-RATA KINERJA SASARAN	%CAPAIAN KEUANGAN	EFISIENSI (POSISI TRIWULAN III)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	74,78%	73,77%	101%
2	SK4		25,91%	23,32%	111%

		Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat			
3	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	4,04%	4,04%	100%
4	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	52,99%	52,99%	100%

2. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia

Tabel II. 21 Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Jumlah eksisting SDM

No	Jumlah Kebutuhan Sdm	Realisasi Sdm	Capaian Sdm	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	100	94	94%	30,796	33,67%	146,63%

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata target kinerja sebesar 100 dengan realisasi kinerja sebesar 42,76% menunjukkan capaian SDM sebesar 88% dengan realisasi sebanyak 88 SDM dari jumlah kebutuhan SDM sebesar 100, dimana realisasi tersebut terdiri atas 66 Pegawai Negeri Sipil dan 23 Pegawai non ASN.

3. Hambatan dan kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

- Masih kurangnya pemenuhan dalam Sumber Daya Manusia yang memenuhi kompetensi di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara;
- Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran;
- Dalam Kegiatan kontrak, faktor cuaca/ faktor alam tidak menentu yg menjadikan kendala dalam pelaksanaannya.



BAB III

PENUTUP

BAB III PENUTUP

III.1 PENUTUP

Dalam rangka perwujudan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara, Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan III ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

III.1.1 Ringkasan Capaian

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan III dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja tahun 2025, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan hingga Triwulan III tahun 2025 ini terdapat 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPTD Kelas III Kalimantan Utara. Terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada tahun 2025 Triwulan III adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 49,70% (Target 90%) tercapai 49,70%;
 - b. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda terealisasi sebesar 61,98% (Target 1 Lokasi) tercapai 61,98%;
 - c. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 34,37% (Target 90%) tercapai 34,37%;
 - d. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 11 Lokasi (Target 53 lokasi) tercapai 65,44%;
 - e. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 69,98% (Target 90%) tercapai 69,98%;
 - f. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0% (Target 100 orang) tercapai 0%;
 - g. Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar 0% (Target 80%) tercapai 0%;
 - h. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi senilai 4,04% (Target 100) tercapai 4,04%;
 - i. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi senilai 52,99% (Target 100) tercapai 52,99%.

2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara;
3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.

III.2 HASIL EVALUASI, REKOMENDASI DAN UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11
2	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
4	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Tanjung Selor, 29 November 2024
Kepala Balai,



IRDA HARIYONO SOEKIRNO, S.SiT.,M.M.
NIP 197101241995031001



PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Kalimantan Utara Tahun 2025

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Kalimantan Utara
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Desti Amelia, A.Md. LLASDP	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	2 / 2025 01	
2.	Dikonsep	Parida Febrianti, A.Md. LLASDP	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	2 / 2025 01	
3.	Dikonsep	Dhia Nazriati, A.Md. LLASDP	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	2 / 2025 01	
4.	Diperiksa	Irda Hariyono Soekirno, S.SiT., M.M.	Kepala Balai	2 / 2025 01	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irda Hariyono Soekirno, S.SiT.,M.M

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D.,M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D.,M.T.
NIP. 196509301990031003

Tanjung Selor, 2 Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara

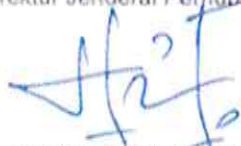
IRDA HARIYONO SOEKIRNO, S.SiT.,M.M
NIP. 1971012495031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11
2	SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80
3	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
4	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

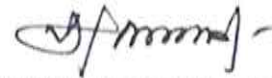
Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 34.789.195.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 1.985.760.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 27.335.420.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.101.000.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.208.439.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 6.645.590.000

Disetujui
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat



AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 196509301990031003

Tanjung Selor, 2 Januari 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara



IRDA HARIYONO SOEKIRNO, S.Si., M.M.
NIP. 1971012495031001



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Kalimantan Utara Tahun 2025

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

Revisi I Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Kalimantan Utara
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Desti Amelia, A.Md. LLASDP	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	1/7 2025	
2.	Dikonsep	Valka Ramdani Himawan S.Tr.T	Penelaah Teknis Kebijakan	1/7 2025	
3.	Dikonsep	Dhia Nazriati, A.Md. LLASDP	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	01/07 2025	
4.	Diperiksa	Iwan Sarwoko, S.SiT.,M.T.	Kepala Balai	01/7 2025	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Iwan Sarwoko, S.Si.T, M.T

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan M.Si

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat


Dr. Drs. AAN SUHANAN M.Si
NIP. 196701312025211001

Tanjung Selor, Juli 2025
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara


IWAN SARWOKO, S.Si.T, M.T
NIP. 197604101998031006



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Sarwoko, S.Si.T.,M.T

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan M.Si

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 196701312025211001

Tanjung Selor, Juli 2025
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara

IWAN SARWOKO, S.Si.T.,M.T
NIP. 197604101998031006

Lampiran I

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11
2	SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80
3	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
4	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 34.789.195.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 1.985.760.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 27.335.420.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.101.000.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.208.439.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 6.645.590.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat


h Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 196701312025211001

Tanjung Selor, Juli 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara


IWAN SARWOKO, S.Si, M.T
NIP. 197604101998031006

Kegiatan		Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	34.789.195.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	1.985.760.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	27.335.420.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	4.101.000.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	6.208.439.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	6.645.590.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 196701312025211001

Tanjung Selor, Juli 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara



IWAN SARWOKO, S.SiT, M.T.
NIP. 197604101998031006

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA

Lampiran 4 Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 20

No	SASARAN PROGRAM	DOKUMEN STRATEGI NASIONAL	SANTIAN	INDIKATOR	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN																		ANGKARAN	TANGGUNG JAWAB
						2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)						
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keselamatan angkutan transportasi	IKK1.1 Peningkatan Layanan Angkutan Jalan Perintis IKK1.3 Peningkatan Layanan Angkutan Barang Perintis Nasional IKK1.5 Peningkatan pelayanan angkutan publik dan angkutan penyeberangan IKK1.6 Jumlah pelabuhan SPP yang beroperasi	%	90	Peningkatan Operasional Angkutan Jalan Perintis Peningkatan Substansi Angkutan Barang Peningkatan Operasional Angkutan penyeberangan Perintis	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90						
			%	90															Rp 5.346.849.000	Kepala Balai					
			%	90																Rp 5.376.180.000	Kepala Balai				
			%	90																Rp 19.144.166.000	Kepala Balai				
2	SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Peningkatan pengurangan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi idel IKK3.5 Jumlah masyarakat yang terdampak langsung IKK7a Peningkatan Standar Bina Jalan IKK7b Peningkatan Standar Bina Jalan	%	90	Peningkatan Pengurangan Jalan Perumahan Asat Uji Kaliber Uji Berada Keselamatan Berada	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90						
			%	90																Rp 25.435.420.000	Kepala Balai				
			%	90																Rp 600.000.000	Kepala Balai				
			Orang	100																Rp 200.000.000	Kepala Balai				
3	SK5 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Transportasi	IKK4.1 Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Transportasi	%	80	Peningkatan Pengurangan Jalan Perumahan Asat Uji Kaliber Uji Berada Keselamatan Berada	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80						
			%	80																Rp 1.000.000.000	Kepala Balai				
			%	80																Rp 1.000.000.000	Kepala Balai				
			Nilai	100																Rp 4.101.000.000	Kepala Balai				
4	SK1 Meningkatkan Berada Angkutan Darat	IKK1.1 Target Peningkatan Angkutan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Berada Angkutan Darat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
			Nilai	100																Rp 6.208.439.000	Kepala Balai				
			Nilai	100	Peningkatan Layanan Berada Angkutan Darat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 6.545.590.000	Kepala Balai				

Tanjung Selor, 2 Januari 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara



Irda Hariyono Soekirno, S.ST., M.M.
NIP 197101241995031001

NO	Isi dari Laporan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tipe	Rencana	Indikator Kinerja Utama	Tipe Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	Tahun 2033	Tahun 2034	Tahun 2035	Tahun 2036	Tahun 2037	Tahun 2038	Tahun 2039	Tahun 2040	Tahun 2041	Tahun 2042	Tahun 2043	Tahun 2044	Tahun 2045	Tahun 2046	Tahun 2047	Tahun 2048	Tahun 2049	Tahun 2050	Tahun 2051	Tahun 2052	Tahun 2053	Tahun 2054	Tahun 2055	Tahun 2056	Tahun 2057	Tahun 2058	Tahun 2059	Tahun 2060	Tahun 2061	Tahun 2062	Tahun 2063	Tahun 2064	Tahun 2065	Tahun 2066	Tahun 2067	Tahun 2068	Tahun 2069	Tahun 2070	Tahun 2071	Tahun 2072	Tahun 2073	Tahun 2074	Tahun 2075	Tahun 2076	Tahun 2077	Tahun 2078	Tahun 2079	Tahun 2080	Tahun 2081	Tahun 2082	Tahun 2083	Tahun 2084	Tahun 2085	Tahun 2086	Tahun 2087	Tahun 2088	Tahun 2089	Tahun 2090	Tahun 2091	Tahun 2092	Tahun 2093	Tahun 2094	Tahun 2095	Tahun 2096	Tahun 2097	Tahun 2098	Tahun 2099	Tahun 2100	Tahun 2101	Tahun 2102	Tahun 2103	Tahun 2104	Tahun 2105	Tahun 2106	Tahun 2107	Tahun 2108	Tahun 2109	Tahun 2110	Tahun 2111	Tahun 2112	Tahun 2113	Tahun 2114	Tahun 2115	Tahun 2116	Tahun 2117	Tahun 2118	Tahun 2119	Tahun 2120	Tahun 2121	Tahun 2122	Tahun 2123	Tahun 2124	Tahun 2125	Tahun 2126	Tahun 2127	Tahun 2128	Tahun 2129	Tahun 2130	Tahun 2131	Tahun 2132	Tahun 2133	Tahun 2134	Tahun 2135	Tahun 2136	Tahun 2137	Tahun 2138	Tahun 2139	Tahun 2140	Tahun 2141	Tahun 2142	Tahun 2143	Tahun 2144	Tahun 2145	Tahun 2146	Tahun 2147	Tahun 2148	Tahun 2149	Tahun 2150	Tahun 2151	Tahun 2152	Tahun 2153	Tahun 2154	Tahun 2155	Tahun 2156	Tahun 2157	Tahun 2158	Tahun 2159	Tahun 2160	Tahun 2161	Tahun 2162	Tahun 2163	Tahun 2164	Tahun 2165	Tahun 2166	Tahun 2167	Tahun 2168	Tahun 2169	Tahun 2170	Tahun 2171	Tahun 2172	Tahun 2173	Tahun 2174	Tahun 2175	Tahun 2176	Tahun 2177	Tahun 2178	Tahun 2179	Tahun 2180	Tahun 2181	Tahun 2182	Tahun 2183	Tahun 2184	Tahun 2185	Tahun 2186	Tahun 2187	Tahun 2188	Tahun 2189	Tahun 2190	Tahun 2191	Tahun 2192	Tahun 2193	Tahun 2194	Tahun 2195	Tahun 2196	Tahun 2197	Tahun 2198	Tahun 2199	Tahun 2200	Tahun 2201	Tahun 2202	Tahun 2203	Tahun 2204	Tahun 2205	Tahun 2206	Tahun 2207	Tahun 2208	Tahun 2209	Tahun 2210	Tahun 2211	Tahun 2212	Tahun 2213	Tahun 2214	Tahun 2215	Tahun 2216	Tahun 2217	Tahun 2218	Tahun 2219	Tahun 2220	Tahun 2221	Tahun 2222	Tahun 2223	Tahun 2224	Tahun 2225	Tahun 2226	Tahun 2227	Tahun 2228	Tahun 2229	Tahun 2230	Tahun 2231	Tahun 2232	Tahun 2233	Tahun 2234	Tahun 2235	Tahun 2236	Tahun 2237	Tahun 2238	Tahun 2239	Tahun 2240	Tahun 2241	Tahun 2242	Tahun 2243	Tahun 2244	Tahun 2245	Tahun 2246	Tahun 2247	Tahun 2248	Tahun 2249	Tahun 2250	Tahun 2251	Tahun 2252	Tahun 2253	Tahun 2254	Tahun 2255	Tahun 2256	Tahun 2257	Tahun 2258	Tahun 2259	Tahun 2260	Tahun 2261	Tahun 2262	Tahun 2263	Tahun 2264	Tahun 2265	Tahun 2266	Tahun 2267	Tahun 2268	Tahun 2269	Tahun 2270	Tahun 2271	Tahun 2272	Tahun 2273	Tahun 2274	Tahun 2275	Tahun 2276	Tahun 2277	Tahun 2278	Tahun 2279	Tahun 2280	Tahun 2281	Tahun 2282	Tahun 2283	Tahun 2284	Tahun 2285	Tahun 2286	Tahun 2287	Tahun 2288	Tahun 2289	Tahun 2290	Tahun 2291	Tahun 2292	Tahun 2293	Tahun 2294	Tahun 2295	Tahun 2296	Tahun 2297	Tahun 2298	Tahun 2299	Tahun 2300	Tahun 2301	Tahun 2302	Tahun 2303	Tahun 2304	Tahun 2305	Tahun 2306	Tahun 2307	Tahun 2308	Tahun 2309	Tahun 2310	Tahun 2311	Tahun 2312	Tahun 2313	Tahun 2314	Tahun 2315	Tahun 2316	Tahun 2317	Tahun 2318	Tahun 2319	Tahun 2320	Tahun 2321	Tahun 2322	Tahun 2323	Tahun 2324	Tahun 2325	Tahun 2326	Tahun 2327	Tahun 2328	Tahun 2329	Tahun 2330	Tahun 2331	Tahun 2332	Tahun 2333	Tahun 2334	Tahun 2335	Tahun 2336	Tahun 2337	Tahun 2338	Tahun 2339	Tahun 2340	Tahun 2341	Tahun 2342	Tahun 2343	Tahun 2344	Tahun 2345	Tahun 2346	Tahun 2347	Tahun 2348	Tahun 2349	Tahun 2350	Tahun 2351	Tahun 2352	Tahun 2353	Tahun 2354	Tahun 2355	Tahun 2356	Tahun 2357	Tahun 2358	Tahun 2359	Tahun 2360	Tahun 2361	Tahun 2362	Tahun 2363	Tahun 2364	Tahun 2365	Tahun 2366	Tahun 2367	Tahun 2368	Tahun 2369	Tahun 2370	Tahun 2371	Tahun 2372	Tahun 2373	Tahun 2374	Tahun 2375	Tahun 2376	Tahun 2377	Tahun 2378	Tahun 2379	Tahun 2380	Tahun 2381	Tahun 2382	Tahun 2383	Tahun 2384	Tahun 2385	Tahun 2386	Tahun 2387	Tahun 2388	Tahun 2389	Tahun 2390	Tahun 2391	Tahun 2392	Tahun 2393	Tahun 2394	Tahun 2395	Tahun 2396	Tahun 2397	Tahun 2398	Tahun 2399	Tahun 2400	Tahun 2401	Tahun 2402	Tahun 2403	Tahun 2404	Tahun 2405	Tahun 2406	Tahun 2407	Tahun 2408	Tahun 2409	Tahun 2410	Tahun 2411	Tahun 2412	Tahun 2413	Tahun 2414	Tahun 2415	Tahun 2416	Tahun 2417	Tahun 2418	Tahun 2419	Tahun 2420	Tahun 2421	Tahun 2422	Tahun 2423	Tahun 2424	Tahun 2425	Tahun 2426	Tahun 2427	Tahun 2428	Tahun 2429	Tahun 2430	Tahun 2431	Tahun 2432	Tahun 2433	Tahun 2434	Tahun 2435	Tahun 2436	Tahun 2437	Tahun 2438	Tahun 2439	Tahun 2440	Tahun 2441	Tahun 2442	Tahun 2443	Tahun 2444	Tahun 2445	Tahun 2446	Tahun 2447	Tahun 2448	Tahun 2449	Tahun 2450	Tahun 2451	Tahun 2452	Tahun 2453	Tahun 2454	Tahun 2455	Tahun 2456	Tahun 2457	Tahun 2458	Tahun 2459	Tahun 2460	Tahun 2461	Tahun 2462	Tahun 2463	Tahun 2464	Tahun 2465	Tahun 2466	Tahun 2467	Tahun 2468	Tahun 2469	Tahun 2470	Tahun 2471	Tahun 2472	Tahun 2473	Tahun 2474	Tahun 2475	Tahun 2476	Tahun 2477	Tahun 2478	Tahun 2479	Tahun 2480	Tahun 2481	Tahun 2482	Tahun 2483	Tahun 2484	Tahun 2485	Tahun 2486	Tahun 2487	Tahun 2488	Tahun 2489	Tahun 2490	Tahun 2491	Tahun 2492	Tahun 2493	Tahun 2494	Tahun 2495	Tahun 2496	Tahun 2497	Tahun 2498	Tahun 2499	Tahun 2500	Tahun 2501	Tahun 2502	Tahun 2503	Tahun 2504	Tahun 2505	Tahun 2506	Tahun 2507	Tahun 2508	Tahun 2509	Tahun 2510	Tahun 2511	Tahun 2512	Tahun 2513	Tahun 2514	Tahun 2515	Tahun 2516	Tahun 2517	Tahun 2518	Tahun 2519	Tahun 2520	Tahun 2521	Tahun 2522	Tahun 2523	Tahun 2524	Tahun 2525	Tahun 2526	Tahun 2527	Tahun 2528	Tahun 2529	Tahun 2530	Tahun 2531	Tahun 2532	Tahun 2533	Tahun 2534	Tahun 2535	Tahun 2536	Tahun 2537	Tahun 2538	Tahun 2539	Tahun 2540	Tahun 2541	Tahun 2542	Tahun 2543	Tahun 2544	Tahun 2545	Tahun 2546	Tahun 2547	Tahun 2548	Tahun 2549	Tahun 2550	Tahun 2551	Tahun 2552	Tahun 2553	Tahun 2554	Tahun 2555	Tahun 2556	Tahun 2557	Tahun 2558	Tahun 2559	Tahun 2560	Tahun 2561	Tahun 2562	Tahun 2563	Tahun 2564	Tahun 2565	Tahun 2566	Tahun 2567	Tahun 2568	Tahun 2569	Tahun 2570	Tahun 2571	Tahun 2572	Tahun 2573	Tahun 2574	Tahun 2575	Tahun 2576	Tahun 2577	Tahun 2578	Tahun 2579	Tahun 2580	Tahun 2581	Tahun 2582	Tahun 2583	Tahun 2584	Tahun 2585	Tahun 2586	Tahun 2587	Tahun 2588	Tahun 2589	Tahun 2590	Tahun 2591	Tahun 2592	Tahun 2593	Tahun 2594	Tahun 2595	Tahun 2596	Tahun 2597	Tahun 2598	Tahun 2599	Tahun 2600	Tahun 2601	Tahun 2602	Tahun 2603	Tahun 2604	Tahun 2605	Tahun 2606	Tahun 2607	Tahun 2608	Tahun 2609	Tahun 2610	Tahun 2611	Tahun 2612	Tahun 2613	Tahun 2614	Tahun 2615	Tahun 2616	Tahun 2617	Tahun 2618	Tahun 2619	Tahun 2620	Tahun 2621	Tahun 2622	Tahun 2623	Tahun 2624	Tahun 2625	Tahun 2626	Tahun 2627	Tahun 2628	Tahun 2629	Tahun 2630	Tahun 2631	Tahun 2632	Tahun 2633	Tahun 2634	Tahun 2635	Tahun 2636	Tahun 2637	Tahun 2638	Tahun 2639	Tahun 2640	Tahun 2641	Tahun 2642	Tahun 2643	Tahun 2644	Tahun 2645	Tahun 2646	Tahun 2647	Tahun 2648	Tahun 2649	Tahun 2650	Tahun 2651	Tahun 2652	Tahun 2653	Tahun 2654	Tahun 2655	Tahun 2656	Tahun 2657	Tahun 2658	Tahun 2659	Tahun 2660	Tahun 2661	Tahun 2662	Tahun 2663	Tahun 2664	Tahun 2665	Tahun 2666	Tahun 2667	Tahun 2668	Tahun 2669	Tahun 2670	Tahun 2671	Tahun 2672	Tahun 2673	Tahun 2674	Tahun 2675	Tahun 2676	Tahun 2677	Tahun 2678	Tahun 2679	Tahun 2680	Tahun 2681	Tahun 2682	Tahun 2683	Tahun 2684	Tahun 2685	Tahun 2686	Tahun 2687	Tahun 2688	Tahun 2689	Tahun 2690	Tahun 2691	Tahun 2692	Tahun 2693	Tahun 2694	Tahun 2695	Tahun 2696	Tahun 2697	Tahun 2698	Tahun 2699	Tahun 2700	Tahun 2701	Tahun 2702	Tahun 2703	Tahun 2704	Tahun 2705	Tahun 2706	Tahun 2707	Tahun 2708	Tahun 2709	Tahun 2710	Tahun 2711	Tahun 2712	Tahun 2713	Tahun 2714	Tahun 2715	Tahun 2716	Tahun 2717	Tahun 2718	Tahun 2719	Tahun 2720	Tahun 2721	Tahun 2722	Tahun 2723	Tahun 2724	Tahun 2725	Tahun 2726	Tahun 2727	Tahun 2728	Tahun 2729	Tahun 2730	Tahun 2731	Tahun 2732	Tahun 2733	Tahun 2734	Tahun 2735	Tahun 2736	Tahun 2737	Tahun 2738	Tahun 2739	Tahun 2740	Tahun 2741	Tahun 2742	Tahun 2743	Tahun 2744	Tahun 2745	Tahun 2746	Tahun 2747	Tahun 2748	Tahun 2749	Tahun 2750	Tahun 2751	Tahun 2752	Tahun 2753	Tahun 2754	Tahun 2755	Tahun 2756	Tahun 2757	Tahun 2758	Tahun 2759	Tahun 2760	Tahun 2761	Tahun 2762	Tahun 2763	Tahun 2764	Tahun 2765	Tahun 2766	Tahun 2767	Tahun 2768	Tahun 2769	Tahun 2770	Tahun 2771	Tahun 2772	Tahun 2773	Tahun 2774	Tahun 2775	Tahun 2776	Tahun 2777	Tahun 2778	Tahun 2779	Tahun 2780	Tahun 2781	Tahun 2782	Tahun 2783	Tahun 2784	Tahun 2785	Tahun 2786	Tahun 2787	Tahun 2788	Tahun 2789	Tahun 2790	Tahun 2791	Tahun 2792	Tahun 2793	Tahun 2794	Tahun 2795	Tahun 2796	Tahun 2797	Tahun 2798	Tahun 2799	Tahun 2800	Tahun 2801	Tahun 2802	Tahun 2803	Tahun 2804	Tahun 2805	Tahun 2806	Tahun 2807	Tahun 2808	Tahun 2809	Tahun 2810	Tahun 2811	Tahun 2812	Tahun 2813	Tahun 2814	Tahun 2815	Tahun 2816	Tahun 2817	Tahun 2818	Tahun 2819	Tahun 2820	Tahun 2821	Tahun 2822	Tahun 2823	Tahun 2824	Tahun 2825	Tahun 2826	Tahun 2827	Tahun 2828	Tahun 2829	Tahun 2830	Tahun 2831	Tahun 2832	Tahun 2833	Tahun 2834	Tahun 2835	Tahun 2836	Tahun 2837	Tahun 2838	Tahun 2839	Tahun
----	------------------	-------------------------	--------	------	---------	-------------------------	------------------------------	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERALUAN KEMBARA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PERCELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGURUSAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

[illegible]



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**